

**Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi
(*Financial Ratio Analysis of Regional Government Budget and Assessment (APBD) in
the Financial Performance of Banyuwangi Government*)**

Mentari Kurnia Dharmawati, Ririn Irmadariyani.
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: mentaridharmawati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Metode analisis data menggunakan analisis rasio yaitu Rasio Kemandirian, Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Varians Pendapatan, Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio efisiensi Belanja, Keserasian Belanja. Berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio keuangan pada APBD pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2014 dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Akan tetapi dari Berdasarkan rasio kemandirian masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi, rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD telah melampaui anggaran yang ditetapkan.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan APBD, APBD

Abstract

This study aims to measure and analyze Financial Ratios Budget (APBD) in the Financial Performance of Local Government Banyuwangi. This study used secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and the Agency for Financial Management and Asset Banyuwangi. Methods of data analysis using analytical ratios Ratios Independence, effectiveness ratio of revenue (PAD), Variance Ratio of Revenue, Expenditure Variance Ratio, Expenditure Growth ratio, efficiency ratio Shopping, Shopping harmony. Based on the analysis of financial ratios calculated in Banyuwangi regency government budget years 2012-2014 can be concluded that the financial performance Banyuwangi regency administration has been good. But of Based independence ratio is low and the degree of dependence on external aid is still high, the ratio shows that the effectiveness of the realization of revenue PAD has exceeded the budget set.

Keyword: Regional Financial Performance, Financial Ratios budget APBD, APBD

Pendahuluan

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan kekuasaan untuk mengatur kepetingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah merupakan lembaga tertinggi yang diberikan kekuasaan untuk mengatur bangsa dan negara (Darlin, 2012:3). Pemerintah terbentuk untuk menjalankan aktivitas publik sehingga lembaga pemerintah tidak mencari laba. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola potensi daerah yang dimilikinya seperti meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

merupakan instrument kebijakan utama yang disusun oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu. Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah APBD merupakan peran terpenting disuatu pemerintahan daerah. APBD merupakan salah satu dokumen rencana kinerja aspek financial, dimana

anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pengembangan daerah.

APBD suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah (Nugraini, 2012:2). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan rutin di dalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan sumber PAD itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan daerah, penerimaan dinas dan lain-lain. Rendahnya angka PAD dapat menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Nordian, 2009:39). Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Menurut Mardiasmo, (2005: 169) Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan.

Penelitian yang pernah menggunakan rasio keuangan sebagai alat analisis keuangan untuk menilai APBD adalah penelitian yang dilakukan Muchina Nugraini 2012 dengan judul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Penelitian tersebut menggunakan analisis keuangan APBD yang meliputi rasio Kemandirian, Rasio Keefektifan APBD, Rasio Antar Komponen, dan Menggunakan analisis Trend.

Pada penelitian yang dilakukan sekarang terdapat perbedaan lokasi, tahun anggaran, serta rasio yang digunakan yaitu tahun 2012-2014 dan dengan menggunakan rasio varians pendapatan dan belanja untuk mengukur realisasi dan anggaran yang telah dianggarkan. Analisis keuangan APBD yang meliputi Analisis Rasio Kemandirian, Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Varians Pendapatan, Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio efisiensi Belanja, Keserasian Belanja. Lokasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data numerik atau angka dan analisisnya menggunakan cara matematis atau dengan teknik statistik (Sugiyono, 2011:130). Metode analisis yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Metode statistik deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami. Dengan Statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Tahap-tahap analisis data yaitu:

- Mendeskripsikan data hasil penelitian di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- Mengevaluasi kinerja keuangan dengan menggunakan analisis keuangan APBD sektor Pemerintah

Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diberikan pada pengumpul data, misalnya dokumen. Data sekunder yang diperoleh berupa catatan-catatan, laporan keuangan dan berbagai publikasi yang relevan terkait dengan masalah yang diangkat. Penelitian yang menggunakan data sekunder adalah penelitian arsip dimana datanya menggambarkan kejadian masa lalu (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Beberapa data yang dibutuhkan antara lain:

- Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi
- Data Realisasi APBD tahun anggaran 2012-2014.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan observasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dan dokumen-dokumen dan catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Nugraini, 2012:32). Dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

- Menghitung Rasio Efektivitas berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

- Analisis Varians Pendapatan

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Anggaran Pendapatan} - \text{Realisasi pendapatan}$$

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja belanja daerah adalah (Halim, 2012) :

a. Analisis Varians Belanja

Varians belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan, yaitu :

$$\text{Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja merupakan pertumbuhan belanja yang dialokasikan pemerintah daerah dari tahun ke tahun, dirumuskan sebagai berikut :

Pertumbuhan Belanja Tahun t =

$$\frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } (t-1)}{\text{Belanja Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

c. Analisis Efisiensi Belanja

Analisis Efisiensi diukur dengan rasio antar realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan, dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

d. Analisis Rasio Keserasian Belanja

$$1) \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$2) \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Rekapitulasi Analisis Pendapatan dan Belanja

Tabel 1. Kriteriaa Penilaian

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|----------------|
| Diatas 100 % | Sangat Efektif |
| 100% | Efektif |
| 90-99% | Cukup Efektif |
| 75-89% | Kurang Efektif |
| Kurang dari 75% | Tidak Efektif |

Sumber : Puspitasari (2012:4)

Hasil dan Pembahasan

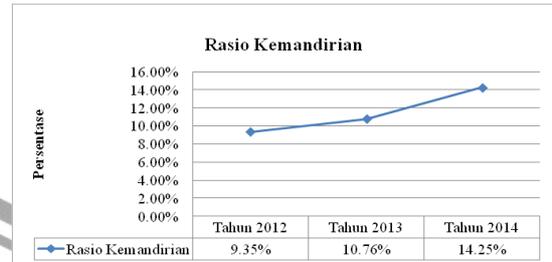
Analisis Rasio Kemandirian

Tabel 2. Analisis Rasio Kemandirian

| Tahun | PAD | Total Bantuan Pemerintah Pusat | Rasio |
|-------|--------------------|--------------------------------|--------|
| 2012 | 139.514.584.000,30 | 1.491.483.677.134,00 | 9,35% |
| 2013 | 183.235.877.421,86 | 1.702.794.926.492,00 | 10,76% |
| 2014 | 283.488.703.181,03 | 1.989.017.340.887,00 | 14,25% |

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012-2014 (Data Diolah)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah hanya sebesar 9,35%. Hal ini berdasarkan kriteria Analisis Pendapatan berarti kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan dan kegiatannya masih jauh dari Kurang dari 75%. Artinya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih Tidak Efektif dalam kemandirian daerahnya.



Gambar 1. Grafik Rasio Kemandirian

Analisis Rasio Efektivitas

Tabel 3. Analisis Rasio Efektivitas

| Tahun | Target PAD | Realisasi PAD | Rasio |
|-------|--------------------|--------------------|---------|
| 2012 | 132.846.110.220,82 | 139.514.584.000,37 | 105,02% |
| 2013 | 171.602.586.394,67 | 183.235.877.421,86 | 106,78% |
| 2014 | 225.108.843.353,75 | 283.488.703.181,03 | 125,93% |

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012-2014 (Data Diolah)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif jika mencapai minimal 100%. Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mulai tahun 2012, 2013 dan 2014 sudah mencapai lebih dari 100%. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bisa dikategorikan efektif dengan rata-rata 112,58%.

Varians Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran. Varians pendapatan digunakan untuk mengukur kinerja PAD pada suatu pemerintah Daerah.

Varians Belanja

Dalam kriteria analisis belanja dapat dikatakan belanja Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah tepat dalam menganggarkan belanja daerahnya. Jadi dengan kata lain untuk belanja Kabupaten

Banyuwangi paling besar dianggarkan pada belanja operasi pada tahun 2012 hingga 2014 pada belanja pegawai.

Hasil dari belanja yang realisasinya lebih kecil dari yang telah dianggarkan maka pemerintah daerah mendapatkan SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran). Pada tahun 2012 sebesar 201.772.632.459,47 tahun 2013 227.680.687.693,66 dan tahun 2014 334.447.460.074,51. Kinerja yang baik dari segi belanja yang dilakukan Pemerintah daerah Banyuwangi.

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

Pada tahun 2012 belanja operasi sebesar 1.325.413.640.538,97 mengalami kenaikan ditahun 2013 menjadi 1.480.425.063.992,67 sehinggadiperoleh rasio 13,89 %. Pertumbuhan ini disebabkan oleh naiknya belanja pegawai dan belanja barang. Belanja Operasi tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 1.737.589.478.560,45 sehingga diperoleh Rasio pertumbuhan 37,96%. Belanja pegawai yang mempengaruhi kenaikan pertumbuhan belanja operasi. Berdasarkan kriteria rekaputulasi pertumbuhan belanja Hasil yang diperoleh pertumbuhan pada belanja operasi sudah baik karena hasil rasio ditahun 2013 hingga 2014 positif.

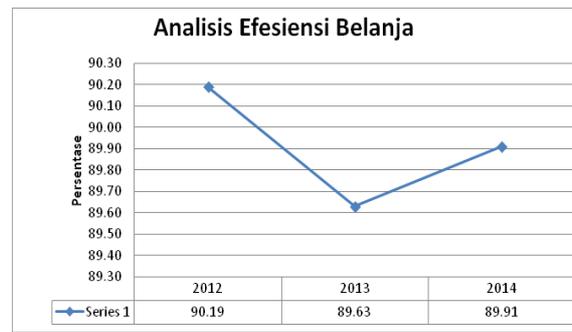
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2012 sebesar Rp 355.481.803.517,18 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 404.860203.010,00 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Belanja Modal tahun 2013 sebesar 11,70%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh Belanja Modal yang semakin meningkat. Hal ini berarti kinerja keuangan kabupaten Banyuwangi dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal sudah baik.

Belanja Modal mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi Rp 558.546.677.147,73 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Belanja Modal tahun 2014 sebesar 17,37%. Hal ini berarti kinerja keuangan Kabupaten Banyuwangi dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal semakin baik. Rasio Pertumbuhan yang cenderung naik dari tahun ke tahun menandakan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dan profesionalisme Kabupaten Banyuwangi dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

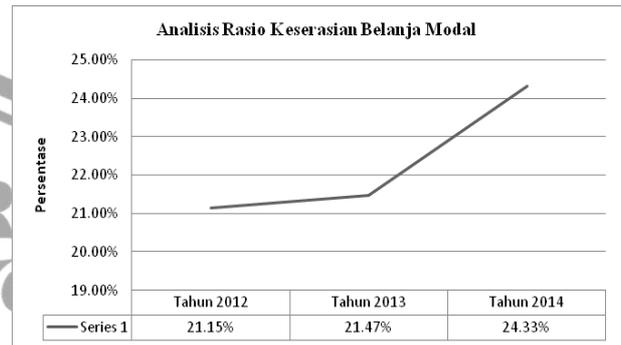
Rasio Efisiensi Belanja

Efisiensi Belanja ditahun 2014 meningkat sebesar 89,91 % hal ini terjadi antara anggaran dan realisasi tidak begitu jauh. Anggaran belanja di tahun 2014 sebesar 2.553.844.868.775,41 dan realisasinya sebesar 2.296.136.155.708,18. Pemerintah melakukan penghematan anggaran dari total anggaran yang telah dianggarkan. Jadi dengan hasil ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mendapatkan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) surlus. Surplus yang dihasilkan dari efisiensi belanja suatu daerah sangat baik yang nantinya dapat dipakai ditahun berikutnya.



Gambar 2. Grafik Efisiensi Belanja

Rasio Keserasian Belanja Modal



Gambar 3. Grafik Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja modal yang dihitung dari pembagian antara belanja modal dengan total belanja keseluruhan. Belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja aset tetap lainnya. Pada tahun 2012 meningkat sebesar 0,32 %. Disebabkan pada belanja modal 354.461.803.517,18 dibagi total semua belanja 1.680.895.444.056,15. Akan tetapi pada tahun 2014 meningkat sebesar 24,33%. Itu artinya alokasi belanja modal sudah optimal.

Rasio Keserasian Belanja Operasi



Gambar 4. Grafik Rasio Belanja Operasi

Dari Grafik diatas terjadi penurunan pada tahun 2012 sebesar 78,85% dan di tahun 2013 sebesar 78,52% hal ini terjadi Karena belanja operasi Kabupaten Banyuwangi kurang optimal. Hal ini disebabkan pada realisasi anggaran belanja operasi tidak banyak dialokasikan untuk belanja rutin. Pada tahun 2014 menurun hingga 75,67%. Rasio pertumbuhan belanja dikatakan baik jika semakin besar %

untuk ekonomi masyarakat. Terjadi penurunan persentase yang berarti pertumbuhan belanja Kabupaten Banyuwangi masih kurang baik.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio keuangan pada APBD pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2014 dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Kinerja pendapatan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah baik terlihat dengan PAD yang meningkat setiap tahunnya dan telah diukur dengan rasio efektivitas menunjukkan PAD yang telah mencapai target. Akan tetapi dari Berdasarkan rasio kemandirian masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi, rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD telah melampaui anggaran yang ditetapkan.

Kinerja Belanja dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga mendapatkan SILPA Surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan, penulis mencoba mengajukan saran yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mempertahankan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan PAD dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan dan menunjang otonomi daerah yang mandiri tidak bergantung pada bantuan transfer pusat. Dalam pengelolaan belanja

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan keterbatasan dalam penelitian ini antara lain periode penelitian yang pendek Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya 3 tahun, yaitu tahun 2012, 2013 dan 2014 sehingga tidak dapat menunjukkan tingkat kecenderungan dalam jangka panjang. Penelitian ini tidak menganalisis keseluruhan unsur APBD sehingga tidak dapat memperoleh hasil analisis yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Daling, Marchelino. 2013. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA*, 1(3) :2303-1174.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Indriantoro dan Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nugraini, Esty Muchina. 2012. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Nordiawan Deddi. 2009. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Puspitasari, Ayu Febriyanti. 2012 *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*. Malang : Universitas Brawijaya

Undang - Undang Republik Indonesia, UU No 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*

Undang – Undang Republik Indonesia UU No 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

